

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan, kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Di Indonesia, masyarakat sudah mendapatkan jaminan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan negara wajib memenuhinya yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003). Dengan demikian, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak dengan akses pendidikan yang memadai dan strategis. Pendidikan formal merupakan prioritas utama pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan secara nasional. Indonesia memang sudah mengalami banyak kemajuan pada bidang pendidikan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan tidak semua warga negara memiliki akses pendidikan yang mudah dijangkau. Hal ini bermakna bahwa pendidikan formal masih belum bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan. Penyebab dari hal demikian, terjadi karena berbagai faktor seperti keterbatasan ekonomi, faktor geografis, dan sosial budaya. Dampak dari adanya keterbatasan-keterbatasan tersebut, banyak masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia (2024) menyatakan bahwa rata-rata lama sekolah di Jawa Barat itu 8,87 tahun. Hal ini berarti bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat se-Jawa Barat hanya sampai jenjang SMP saja.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusuf & Razi (2025; hlm.52) menyatakan bahwa faktor sosial ekonomi berpengaruh nyata dalam pencapaian pendidikan formal di Indonesia. Pemerintah perlu lebih memperhatikan daerah-daerah yang wilayahnya dengan pengeluaran rendah, tingkat kemiskinan tinggi, harapan hidup rendah, dan tingkat pendidikan juga rendah. Beberapa program yang direkomendasikan yaitu memberikan beasiswa daerah, menyediakan sekolah yang

gratis dan terjangkau oleh masyarakat, dan memberikan bantuan dana. Dalam konteks ini, pendidikan kesetaraan menjadi jalur alternatif yang memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan untuk mengikuti pendidikan formal. Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal berupa paket A, B, dan C yang setara dengan pendidikan formal yaitu SD, SMP dan SMA (Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003). Pendidikan ini bersifat fleksibel dan memungkinkan masyarakat memperoleh ijazah yang resmi sehingga memberikan peluang lebih besar dalam dunia kerja, pendidikan lanjutan maupun pengembangan diri.

Pendidikan bisa dijadikan sebagai alat pemberdayaan terutama pendidikan orang dewasa termasuk pendidikan kesetaraan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Freire et al., (2018) bahwa pendidikan harus menjadi proses yang membebaskan dan memberdayakan, memungkinkan orang untuk menjadi subjek dalam proses belajar dan perubahan sosial. Pendidikan juga akan menjadi alat pemberdayaan sebagai solusi untuk daerah yang mengalami keterbelakangan pendidikan. Generasi muda memiliki peran strategis menjadi penggerak dalam program pemberdayaan sebagai agen perubahan sosial. Tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, 209 C.E. menyatakan bahwa pemuda merupakan warga negara Indonesia berusia 16-40 tahun yang memasuki masa pertumbuhan dan perkembangan. Wujud pemuda sebagai agen pembaharu yaitu dengan mengembangkan pendidikan politik dan demonstrasi, sumber daya ekonomi, kepedulian terhadap masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga, seni dan budaya, kepedulian terhadap lingkungan hidup, pendidikan kewirausahaan, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda. Maka dari itu, pemuda merupakan kunci penting sebagai sumber daya penggerak dalam membangun bangsa dalam berbagai aspek kehidupan.

Pemuda berfungsi sebagai sumber daya yang memiliki potensi besar sebagai generasi penerus yang berperan penting dalam membawa perubahan di dalam masyarakat. Pemuda memainkan peran yang signifikan sebagai *control social*, kekuatan moral, dan sebagai *agent of change* (Susanto, 2016) dalam (Adi Saputra,

2019; hlm.836). Pada konteks pendidikan kesetaraan sebagai solusi dari adanya kesenjangan atau keterbelakangan disuatu daerah, pemuda berperan menjadi penggerak utama yang dapat memobilisasi komunitas dan menginisiasi program-program pendidikan alternatif yang berkelanjutan seperti pendidikan kesetaraan. Program Lantera Bumi di Kampung Galumpit, Setiawargi, Kota Tasikmalaya menunjukkan secara nyata bagaimana generasi muda memainkan peran kunci dalam menghadirkan pendidikan kesetaraan sebagai solusi dari permasalahan masyarakat. Melalui upaya ini, pemuda berfungsi sebagai fasilitator, motivator, dan jembatan antara masyarakat, pemerintah, dan organisasi sosial lainnya. Kampung Galumpit yang berada di Kelurahan Setiawargi Kota Tasikmalaya menghadapi berbagai permasalahan sosial khususnya keterbatasan akses pada pendidikan formal. Rata-rata masyarakat Kampung Galumpit menempuh pendidikan itu hanya sampai SD dan SMP saja. Hal tersebut sejalan dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia (2024) yang menunjukkan Rata-Rata Lama Sekolah (RTL) di Kota Tasikmalaya hanya mencapai 7,97. Kondisi demikian, disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya keterbatasan ekonomi sehingga masyarakat memilih untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup daripada menempuh pendidikan, akses ke sekolah formal itu cukup jauh sehingga memicu hilangnya keinginan untuk menempuh pendidikan, minimnya program pendidikan alternatif bagi masyarakat yang mencakup semua jenjang usia dengan waktu yang fleksibel, lokasi dekat rumah dan mudah diakses, dan belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai pendidikan nonformal bahkan kesadaran akan pentingnya pendidikan itu masih rendah.

Program Lantera Bumi hadir sebagai respon terhadap kondisi demikian dengan menyelenggarakan pendidikan alternatif berupa pendidikan kesetaraan yang mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Program ini membangun rasa kepemilikan dan partisipasi aktif masyarakat. Program Lantera Bumi merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh Komunitas Pemuda Penggerak Tasikmalaya yang disingkat menjadi Pager Asik. Komunitas ini sebagai organisasi kepemudaan di bidang sosial. Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat yang ada di Kota Tasikmalaya melalui peran para pemuda Kota Tasikmalaya. Salah satu bentuk

pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi masalah sosial yaitu melalui kelompok kerja sosial yang saling bekerja sama dan saling berpartisipasi aktif dalam proses pemberdayaan (Oktiawanti, 2016). Program Lantera Bumi ini merupakan nama dari program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Makna dari lantera bumi yaitu memberikan pencerahan kepada masyarakat yang ada di wilayah Galumpit, Setiawargi Kota Tasikmalaya supaya dapat mengembangkan diri secara mandiri. Komunitas Pemuda Penggerak Tasikmalaya memiliki beberapa bidang cakupan salah satunya yaitu SIMY (*Social Innovation Academy*). SIMY mempunyai misi untuk membuat anak muda bisa mengaplikasikan keterampilan serta kemampuannya tersebut langsung di lingkungan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman yang membuat perubahan model masalah sosial. Program lantera bumi ini termasuk ke dalam program SIMY, dimana program lantera bumi ini berawal dari kelas inkubasi. Kelas inkubasi ini merupakan kelas mengenai *community development* secara teori kurang lebih 3 (tiga) bulan. Setelah itu, SIMY memfasilitasi peserta kelas inkubasi untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat di lapangan supaya berdampak pada masyarakat secara nyata. Maka dari situlah hadir program bernama Lantera Bumi yang anggotanya merupakan peserta kelas inkubasi sebagai *volunteer* dan tetap dalam bimbingan Komunitas Pemuda Penggerak Tasikmalaya.

Lokasi pelaksanaan programnya di Kampung Galumpit, Setiawargi Kota Tasikmalaya. Menurut Ketua program Lantera Bumi menyatakan bahwa makna dari lantera bumi yaitu memberikan pencerahan kepada masyarakat yang ada di Kampung Galumpit, Setiawargi Kota Tasikmalaya supaya dapat mengembangkan diri secara mandiri. Komunitas Pemuda Penggerak Tasikmalaya menjalankan program Lantera Bumi sebagai program pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan yaitu menyelenggarakan pendidikan kesetaraan dengan membentuk kelompok kerja sosial kolaboratif.

Kelompok kerja sosial ini menggunakan pendekatan kolaboratif yaitu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengatasi masalah sosial yang kompleks secara lebih efektif. Dalam konteks program Lantera Bumi yang diinisiasi oleh Komunitas Pagar Asik dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan di Kampung

Galumpit, Setiawargi Kota Tasikmalaya, kolaborasi yang diterapkan yaitu kolaborasi multi-pihak. Kolaborasi ini antara Komunitas Pemuda Penggerak Tasikmalaya sebagai aktor utama yang bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat yaitu Kelurahan, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dalam konteks pelayanan sosial, kelompok pekerja sosial berperan sebagai pemrakarsa penanganan masalah, penyedia layanan, program pendamping, fasilitator komunikasi, serta mitra strategis pemerintah dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (Riyadi et al., 2025; hlm.172). Temuan tersebut mendukung penelitian ini menggunakan *group work* yang menunjukkan pentingnya kolaborasi atau kerja sama antara pekerja sosial, masyarakat, dan lembaga untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Namun temuan diatas menerapkan konsep kolaborasi kelompok kerja sosial cenderung melibatkan mitra pemerintah dan lembaga formal sebagai fasilitator utama dengan pendekatan yang cenderung *top-down*. Sedangkan dalam penelitian ini, konsep kolaborasi kelompok sosialnya lebih setara dan berbasis komunitas pemuda, dimana komunitas pemuda ini menjadi penggerak utama dalam membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan.

Integrasi peran kolaboratif kelompok kerja sosial dengan komunitas pemuda sebagai penggerak utama khususnya dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan ternyata belum ada yang meneliti secara mendalam. Biasanya, pendidikan kesetaraan diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai serta pengawasan dari Dinas Pendidikan setempat (Harlinda et al., 2020). Namun, penelitian ini mengeksplorasi pendekatan inovatif dimana pendidikan kesetaraan dijalankan secara kolaboratif di tempat tinggal warga di Kampung Galumpit, Setiawargi Kota Tasikmalaya yang diinisiasi oleh komunitas Pemuda Penggerak Tasikmalaya (Pager Asik) bukan PKBM. Pendekatan ini memanfaatkan ruang komunitas nonformal untuk meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat yang sulit menjangkau PKBM, sehingga mengisi kekosongan pengetahuan tentang adaptasi program yang fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan lokal. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman mengenai kelompok kerja

sosial secara kolaboratif dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dengan kontribusi pemuda sebagai penggerak utama. Urgensi dalam penelitian ini terletak pada kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan yang cukup mendesak untuk mengatasi sulitnya menjangkau pendidikan formal yang dampak jangka panjangnya akan meningkatkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Maka dari itu perlu menghadirkan model penyelenggaraan pendidikan yang lebih inovatif, adaptif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu mengembangkan pelaksanaan pendidikan kesetaraan yang berlokasi di sekitar tempat tinggal masyarakat yang membutuhkan pendidikan dengan melibatkan para pemuda sebagai penggerak bidang pendidikan.

Hadirnya Komunitas Pemuda Penggerak Tasikmalaya sebagai inisiator pendidikan kesetaraan melalui program Lantera Bumi menunjukkan adanya inovasi sosial yang menandai pergeseran peran pemuda, dari sekedar penerima manfaat menjadi agen perubahan. Penelitian ini juga memiliki relevansi dalam konteks pengembangan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Dengan memahami kontribusi kelompok kerja sosial yang berkolaborasi, terutama dipimpin oleh generasi muda, diharapkan model pemberdayaan yang efektif dan berkelanjutan dapat dikembangkan untuk meningkatkan akses pendidikan kesetaraan di kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Kelompok Kerja Sosial Kolaboratif Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan” Studi pada Program Lantera Bumi oleh Pemuda Penggerak Tasikmalaya di Kampung Galumpit, Setiawargi, Kota Tasikmalaya”. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, organisasi sosial, dan para pemangku kepentingan dalam merancang program pemberdayaan masyarakat yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kelompok kerja sosial kolaboratif menyelenggarakan pendidikan kesetaraan melalui program

lantera bumi oleh Pemuda Penggerak Tasikmalaya di Kampung Galumpit, Setiawargi Kota Tasikmalaya?

1.3. Definisi Operasional

Definisi Operasional dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.3.1. Peran Kelompok Kerja Sosial Kolaboratif

Peran kelompok kerja sosial kolaboratif merupakan serangkaian fungsi, kontribusi, dan tindakan yang dijalankan oleh berbagai pihak secara kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama dalam mengatasi masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kelompok kerja sosial oleh Komunitas Pemuda Penggerak Tasikmalaya sebagai aktor utama yang berkolaborasi dengan Pemerintah daerah dan PKBM Al-Fattah dalam merancang dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dengan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di Kampung Galumpit, Setiawargi Kota Tasikmalaya.

1.3.2. Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan adalah penyelenggaraan pendidikan nonformal yang memberikan kesempatan belajar dan melanjutkan pendidikan bagi masyarakat yang tidak bisa menjangkau pendidikan formal. Pendidikan kesetaraan ini berupa paket A, B, dan C setara dengan pendidikan formal yaitu SD, SMP, dan SMA yang biasanya dilaksanakan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dalam konteks penelitian ini yaitu pelaksanaan pendidikan kesetaraan sebagai hasil dari program Lantera Bumi untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Kampung Galumpit, Setiawargi Kota Tasikmalaya untuk melanjutkan pendidikan yang setara dengan pendidikan formal. Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan ini bukan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melainkan di Kampung Galumpit, dimana rumah warga itu sebagai sekolah atau kelas.

1.3.3. Program Lantera Bumi oleh Pemuda Penggerak Kota Tasikmalaya

Program merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks penelitian ini, program Lantera Bumi merupakan program yang diinisiasi oleh Komunitas Pemuda Penggerak Tasikmalaya yang

bertujuan untuk memberdayakan masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan melalui kegiatan sosial, edukasi, dan inovasi berkelanjutan secara kolaboratif dengan PKBM dan Pemerintah Daerah. Komunitas Pemuda Penggerak Tasikmalaya ini merupakan wadah generasi muda yang bergerak dalam bidang sosial untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di Kota Tasikmalaya.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kelompok kerja sosial secara kolaboratif menyelenggarakan pendidikan kesetaraan melalui program lantera bumi oleh Pemuda Penggerak Tasikmalaya di Kampung Galumpit, Setiawargi Kota Tasikmalaya.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1.5.1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi secara teoritis pada pengembangan keilmuan khususnya pendidikan masyarakat dalam mata kuliah pengorganisasian sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5.2. Manfaat Praktis

1.5.2.1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kolaborasi kelompok kerja sosial yang diterapkan dalam program pemberdayaan dengan menyelenggarakan pendidikan alternatif berupa pendidikan kesetaraan.

1.5.2.2. Bagi Komunitas Pemuda Penggerak Tasikmalaya (Pager Asik)

Penelitian ini dapat memperkuat posisi komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sebagai agen perubahan.

1.5.2.3. Bagi PKBM Al-Fattah

Penelitian ini dapat menjadi patokan dalam mengembangkan program pendidikan nonformal khususnya kesetaraan dengan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.5.2.4. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam merancang program pemberdayaan masyarakat yang bekerja sama dengan pemuda dan organisasi/lembaga non pemerintah.

1.5.2.5. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat mendorong masyarakat untuk mendukung dan ikut berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas hidup.

1.5.3. Manfaat Empiris

Secara empiris, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk lembaga-lembaga lain terutama pekerja sosial atau komunitas pemuda dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.